



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
DENGAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor: 98/G164/U.01/D/C.06/VII/2023  
Nomor: PPE.HH.04.04-71**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I.**, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang (kemudian disebut "UNISMA"), yang berkedudukan di UNISMA, Jalan MT Haryono No. 193 Malang, Jawa Timur 65144, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 98/G164/U.01/D/C.06/VII/2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.**, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 15/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Agama Islam di UNISMA yang dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang ilmu hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

**PIHAK KEDUA** adalah Direktur Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**PARA PIHAK** mengakui pentingnya kerja sama ini adalah untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi **PIHAK KESATU** dan program kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan publik bagi **PIHAK KEDUA**.

Atas pertimbangan tersebut dan berlandaskan iktikad baik dengan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam **PERJANJIAN KERJA SAMA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

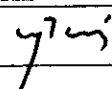

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia antar institusi;
2. memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada masing-masing institusi; dan
3. memfasilitasi pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki masing-masing institusi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya masing-masing pihak.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- a. pemagangan/praktik kerja;
- b. pengajaran/asistensi pengajaran;

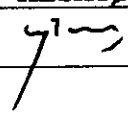

2

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
	

- c. penelitian;
- d. pengabdian kepada masyarakat;
- e. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan/atau
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. mengirimkan dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
  - b. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
  - c. mendapatkan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka penelitian, penyusunan karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
  - d. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. dilibatkan dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
  - f. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. memberikan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa dalam rangka di bidang ilmu hukum dan perundang-undangan;
  - b. dilibatkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
  - d. mendapatkan hasil monitoring, penilaian, dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. memberikan akses kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan edukasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa di bidang ilmu hukum dan perundang-undangan;
  - b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan yang menunjang program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
	

- c. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam rangka menunjang program kegiatan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama; dan
- d. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

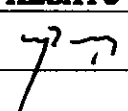
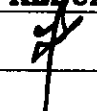
- a. menerima dan menempatkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan pemagangan;
- b. memberikan bantuan sumber daya manusia dalam kegiatan pengajaran atau pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan perundang-undangan;
- c. memberikan layanan administrasi, akses informasi, dan data penelitian bagi dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian guna penyusunan penelitian, karya ilmiah, atau penyelesaian studi;
- d. memberikan bantuan sumber daya manusia dan layanan administrasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan **PIHAK KEDUA**;
- e. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka menunjang ruang lingkup kerja sama; dan
- f. memberikan hasil monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan kerja sama.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, dengan teknis pelaksanaan sesuai kesepakatan para pihak.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing.

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
	

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
EVALUASI**

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notula rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

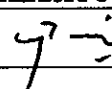

**PASAL 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan; dan
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

5

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
	



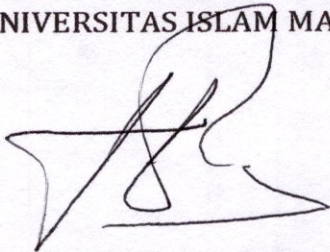
**PIHAK KESATU :** Dekan Fakultas Agama Islam UNISMA  
Jalan MT Haryono No. 193 Malang Jawa Timur 65144  
Telepon: 0341 - 551932  
Faksimile: 0341 - 552249  
Email: fai@unisma.ac.id

**PIHAK KEDUA :** Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
12940  
Telepon : 022 - 5221618  
Faksimile: 021 - 5265480  
Email: kerjasama.ditjenpp@gmail.com

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

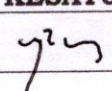

**PIHAK KESATU,  
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**



**Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I.  
NPP. 1910200036**

**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum**  
NIP. 196908141996031001

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
	



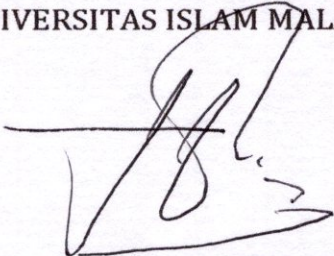
**PIHAK KESATU :** Dekan Fakultas Agama Islam UNISMA  
Jalan MT Haryono No. 193 Malang Jawa Timur 65144  
Telepon: 0341 - 551932  
Faksimile: 0341 - 552249  
Email: fai@unisma.ac.id

**PIHAK KEDUA :** Direktur Jenderal Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
12940  
Telepon : 022 - 5221618  
Faksimile: 021 - 5265480  
Email: kerjasama.ditjenpp@gmail.com

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.





**PIHAK KESATU,  
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

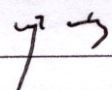


**Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I.**  
NPP. 1910200036

**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196908141996031001

No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konseptor	4 Agustus 2023	
2.	Subkoordinator		
3.	Koordinator		
4.	Sekretaris		

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
	



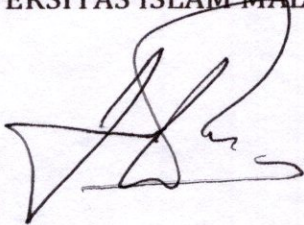
**PIHAK KESATU :** Dekan Fakultas Agama Islam UNISMA  
Jalan MT Haryono No. 193 Malang Jawa Timur 65144  
Telepon: 0341 - 551932  
Faksimile: 0341 - 552249  
Email: fai@unisma.ac.id

**PIHAK KEDUA :** Direktur Jenderal Perundang-undangan,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan  
12940  
Telepon : 022 - 5221618  
Faksimile: 021 - 5265480  
Email: kerjasama.ditjenpp@gmail.com

**PASAL 10  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap dua asli dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

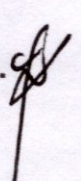
**PIHAK KESATU,  
DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**







**Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pd.I.  
NPP. 1910200036**

**PIHAK KEDUA,  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196908141996031001



No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Konseptor	4 Agustus 2023	
2.	Subkoordinator		
3.	Koordinator		
4.	Sekretaris		

Pihak I <b>PIHAK KESATU</b>	Pihak II <b>PIHAK KEDUA</b>
